



RENCANA KERJA (RENJA)

RENJA

2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

DAFTAR ISI

DAFTAR

ISI.....

KATA PENGANTAR.....

BAB I PENDAHULUAN.....

- I. Latar Belakang.....
- II. Landasan Hukum.....
- III. Struktur Organisasi.....
- IV. Tugas Pokok Dan Fungsi.....
- V. Visi dan Misi Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022.....

- I. Capaian Kinerja 2022
- II. Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2024

- I. Program/Kegiatan Prioritas Renstra 2021-2026
- II. Rencana Program/Kegiatan Tahun 2024

BAB V PENUTUP.....

Lampiran Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....

KATA PENGANTAR

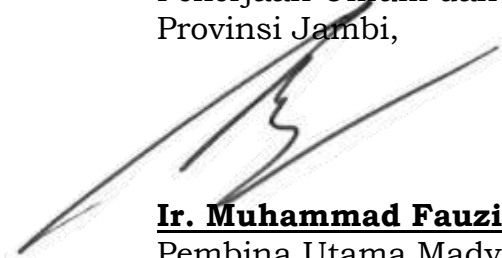
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana kami telah dapat menyusun Laporan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Hal tersebut merupakan upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026, maka berdasarkan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi perlu menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 dalam implementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Hal ini merupakan bentuk pengukuran terhadap program/kegiatan yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan, yang mana acuan nanti akan berpedoman pada Pergub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021-2026. Guna memberikan gambaran sejauh mana rancangan Renja yang ingin dilaksanakan satu tahun kedepan.

Akhir kata Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta

peningkatan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Jambi,



Ir. Muhammad Fauzi, MT

Pembina Utama Madya

NIP.19640304 199203 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan salah satu di antara beberapa dinas yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan bagian Integral dari Pemerintah Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana melalui :

1. Bagian Sekretariat
2. Bidang Sumber Daya Air (SDA)
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Cipta Karya
5. Bidang Perumahan Rakyat
6. Bidang Bina Program dan Tata Ruang
7. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
8. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
9. UPTD Workshop dan Peralatan

B. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Propinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi masih bernama Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Provinsi Jambi merupakan Hasil pengintegrasian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, yang organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas – dinas Provinsi Jambi. Pembentukan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Perda No.2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi,

**Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi**



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dimana pada Bab II Bagian Pertama Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Dina Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan **Fungsinya**:

- 1) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Jambi sesuai dengan bidang tugasnya.

Dimana penyelenggaraan Tupoksinya tersebut OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai media pelaksana (Tim Leader) dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas : a) Melaksanakan ketentuan sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum
b) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, bidang , UPTD dan kelompok jabatan fungsional

2. Sekretariat

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan dibidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) pengkoordinasi kegiatan dinas ;
- b) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- c) penataan organisasi dan tata laksana;
- d) pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa;
- f) penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- g) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
- h) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- i) penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

- j) penyelesaian tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota wilayah provinsi;
- k) pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Program dan Tata Ruang

- Tugas** : Membantu Bidang Bina Program dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan penyusunan program dan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- Fungsi** :
- a. pengkoordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;
 - b. penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi;
 - c. penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/ kota;
 - d. pembinaan kepada kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang;
 - f. penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;

- h. pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang provinsi;
- i. pengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang provinsi;
- j. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4). Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka membantu bidang melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administrative guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- b) penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
- c) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/ kota;
- d) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- e) pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan

sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;

- f) pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
- g) pelayanan kebijakan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
- h) penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skun der untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
- i) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
- j) pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- k) pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi dibidang sumber daya air;
- l) pengembangan sistem pembiayaan dibidang sumber daya air;
- m) pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola dibidang sumber daya air;

- n) pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air baik pada irigasi, rawa, sungai danau pantai dan air baku; dan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5). Bidang Bina Marga

Tugas : Membantu Dinas Dalam Rangka Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- b) penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- c) penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- d) pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- e) perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- f) perumusan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- g) pengkoordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;

- h) perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- i) pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- j) pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k) pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian - bagian jalan;
- l) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan, pengujian;
- m) pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah provinsi jambi ;
- n) pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- o) pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga; dan
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6). Bidang Cipta Karya

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang cipta

karya serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi** :
- a) penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
 - b) penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
 - c) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
 - d) fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung lingkup sektoral;
 - e) pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten / kota yang menjadi kewenangan provinsi;
 - f) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
 - g) pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
 - h) penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;

- i) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- j) penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- k) pembinaan dan penyusunan program tata bangunan dan lingkungan;
- l) pengelolaan dan pengendalian sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP); dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7). Bidang Perumahan

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) Merumuskan program dan kegiatan bidang Perumahan Rakyat.
- b) pembinaan SDM bidang perumahan lintas kab/ kota dan atau yang menjadi kewenangan provinsi;
- c) pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat provinsi;

- d) pengendalian penyiapan NSPM bidang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- e) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
- f) pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi;
- g) penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
- h) penyelenggaraan PSU permukiman;
- i) pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- j) perumusan kebijakan dan strategi provinsi dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis perumahan formal;
- k) pengkoordinasian untuk fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pembiayaan perumahan MBR;
- l) perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang pendataan, pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku pem bangunan perumahan swadaya ; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8). UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi

Tugas : Melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dalam bidang pelayanan jasa Pengujian mutu air, mekanisme tanah, geologi dan bahan Bangunan.

Fungsi :

- a) Penyusunan Program Kerja kegiatan kelaboratoriuman dengan mengacu pada kebijakan mutu laboratorium.
- b) Penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium
- c) Pelayanan jasa pengujian
- d) Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian
- e) Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium
- f) Pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium.
- g) Pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium
- h) Pelaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium
- i) Pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian.

9). Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka Melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b) pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- c) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
- d) pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- e) pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- f) peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi;
- g) pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- h) pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

- i) pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian dibidang pekerjaan umum dalam wilayah provinsi;
- j) penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia lingkup dinas;
- k) penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup dinas;
- l) pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas; dan
- m) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10). UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

Tugas : Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang diberikan Dinas PUPR dalam bidang pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengoperasian, pelayanan jasa, pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai.

Fungsi :

- a) Penyusunan program kerja balai
- b) Pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai

- c) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
- d) Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
- e) Pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
- f) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi terkait dengan penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung dengan cara swakelola.
- g) Pelaksanaan pengelolaan perbekalan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Visi dan Misi Renja 2024

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari penjabaran RPJMD Provinsi Jambi, visi Gubernur **“JAMBI MANTAP 2021”**(*Maju, Aman, Nyaman, Tertip, Amanah dan Profesional*) dan misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Maka di jabarkan pula lebih spesifik ke dalam misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memantapkan kualitas sarana dan prasarana jalan provinsi.
2. Pemantapan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dapat mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air.
3. Memantapkan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

I. CAPAIAN KINERJA 2022

Berawal dari Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2022 yang tergambar dalam Rencana Penetapan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022, berikut dapat dirincikan capaian indikator utama Renja Tahun 2022 sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	persen	79,60%	77,36%
2	Terwujudnya pengelolaan SDA terpadu	Persentase berkurangnya daerah rawan longsor dan banjir di WS kewenangan Provinsi dan pengelolaan SDA.	Persen	39,38%	30,68%
		Persentase berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	persen	81,04%	79,65%
3	Penurunan lingkungan kumuh	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh.	Ha	185 Ha	13,90 Ha

4	Terpenuhinya akses air minum layak.	Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan tahapan air minum layak, perkotaan dan pedesaan	persen	78,06%	0,80%
5.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten.	persen	40,00%	45,00%
6.	Meningkatkan nya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Predikat AKIP	BB		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	91%	91,6%

- Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2022 akan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan jalan dalam kondisi mantap yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :

1. Kemampuan teknis
2. Pengawasan yang baik
3. Matangnya perencanaan

Persentase fungsionalisasi daerah irigasi pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan lahan pertanian. Bila dibandingkan dengan target Persentase fungsionalisasi daerah irigasi yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2022. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan luas

daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama dengan Dinas Pertanian. Langkah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian. Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi.

No	DI Potensial Berdasarkan kewenangan Provinsi berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 Ttg Kriteria & Penetapan Status D.I		Capaian %
	Nama Daerah Irigasi	Luas (ha)	
1.	Sungai Batang Uleh	2.043	55,36 %
2.	Sungai Tanduk	1.265	67,63 %
3.	Sungai Suban	1.121	75,69 %
4.	Sungai Limun Singkut	1.600	58,99 %
	Jumlah	6.029	

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa panjang sungai yang dinormalisasi (M). Panjang sungai yang dinormalisasi (M) ditandai dengan meningkatnya luasan wilayah terbebas dari banjir. Adapun faktor yang mempengaruhi panjang sungai yang dinormalisasi (M) yaitu dukungan berupa bantuan teknis

dan keuangan dari pihak Pemerintah serta peranan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitusaja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada panjang sungai yang di normalisasi (M).

- Faktor yang mempengaruhi peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta dan kemiskinan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan yaitu aksesibilitas dan penduduk.
- Peningkatan Persentase rumah kumuh di perkotaan ditandai dengan terciptanya lingkungan yang bersih. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Persentase rumah kumuh di perkotaan yaitu kurangnya dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Persentase rumah kumuh di perkotaan yaitu :
 1. Pemerintah harus mampu mengurangi rumah tangga kumuh di perkotaan maupun di perdesaan.
 2. Peranan masyarakat harus ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan lain-lain sebagainya.
- Peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta serta penduduk yang telah mengerti tentang

penggunaan sanitasi yang layak. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi yang layak di perkotaan dan perdesaan yaitu aksesibilitas dan penyuluhan kepada masyarakat.

- Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel yang diuji oleh Balai Pengujian pertahun yaitu kemampuan teknis dan peralatan yang memadai. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan jumlah sampel yang diuji oleh Balai Pengujian pertahun yaitu peranan para jasa konstruksi. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.
- Panjang ruas jalan yang dipelihara Balai Peralatan dan Perbekalan (km) pertahun ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Adapun faktor yang mempengaruhi Panjang ruas jalan yang dipelihara Balai Peralatan dan Perbekalan (km) pertahun yaitu kemampuan teknis, peralatan yang memadai dan ketersediaan material. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Panjang ruas jalan yang dipelihara Balai Peralatan dan Perbekalan (km) pertahun yaitu peranan para jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian (orang) pertahun ditandai dengan meningkatnya tenaga terampil. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian (orang) pertahun yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran pelaku konstruksi
2. Tersedianya lokakarya atau pelatihan

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian(orang) pertahun yaitu peranan para Jasa Konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

II. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 2022

Dari total keseluruhan pagu anggaran di tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar Rp.826.414.533.844 Dimana yang terealisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.782.017.377.475 Atau Rp.98.12 %.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

1. Memantapkan kualitas sarana dan prasarana jalan provinsi.
2. Pemantapan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dapat mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air.
3. Memantapkan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni.

B. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja. Penetapan sasaran organisasi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Fokus utama dalam penentuan sasaran organisasi ini adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja melalui indikator yang terukur.

Sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

1. Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap
2. Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
3. Penurunan lingkungan kumuh.

4. Meningkatnya penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
5. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses.
6. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Bab IV Urusan Pemerintahan; Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren; Pasal 12 ayat (2) dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) urusan wajib Pelayanan dasar yaitu :

1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

I. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA 2021-2026

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2021-2026 ini lebih digambarkan program/kegiatan prioritas pada bidang-bidang infrastruktur untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, sebagai berikut :

A. Bidang Sumber Daya Air

Acuan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Berdasarkan kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

- Pengelolaan sumber daya air dan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000ha – 3000ha.

1. Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :

- Fasilitasi percepatan pembangunan Bendungan di Kabupaten Merangin
- Percepatan penuntasan pemanfaatan Irigasi Suban Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Tanduk di Kerinci
- Penuntasan jaringan primer dan sekunder Irigasi Limun Singkut di Kabupaten Sarolangun
- Revitalisasi Irigasi Batang Uleh di Kabupaten Bungo
- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Rawa Sei. Ayam, Sei. Senyerang, Teluk Ketapang, Teluk Nilau, Koto Kandis, Nipah Panjang I-II, Rantau Rasau, Simpang Datuk, Simpang Puding dan Sungai Raya

2. Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD Provinsi Jambi yang dimaksud, yaitu :

- Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi

- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Pembangunan Bendung Irigasi
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa

B. Bidang Bina Marga

1) Acuan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Berdasarkan kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu Penyelenggaraan jalan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi.

2) Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :

- Meningkatkan konektivitas, dengan;
 - a) Percepatan peningkatan penanganan jalan Provinsi (Jalan Simpang Pelawan - Sungai Salak - Pekan Gedang)
 - b) Percepatan Penuntasan Jalan Simpang Padang Lamo - Simpang Log pond - batas Provinsi Sumbar
 - c) Pembangunan Baru Jembatan Sentano perbatasan Tebo dan Provinsi Riau;
 - d) Fasilitas Percepatan Pembangunan jalan tol (Jambi - Rengat) melalui penetapan lokasi jalan tol
 - e) Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung

- f) Fasilitas Percepatan Pembangunan Baru Jalan Khusus
- g) Peningkatan status jalan Kabupaten dalam status mantap menjadi jalan Provinsi
- h) Peningkatan Jalan Tembus Batang Asai – Jangkat
- i) Fasilitas Pembangunan Baru Jembatan Batanghari III
- j) Pembangunan Baru Jembatan Sungai Pengabuan;
- Pengurangan indeks resiko bencana, dengan;

Mendorong pembangunan jalan evakuasi bencana di Kabupaten Sarolangun, Merangin Kerinci sebagai upaya dalam mitigasi bencana, rencana pembangunan jalur evakuasi di wilayah Provinsi Jambi.

3) Program/Kegiatan Prioritas

Untuk spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud :

- Program Penyelenggaraan Jalan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
- Pengelolaan Leger Jalan
- Survey kondisi jalan dan jembatan yang harus lakukan setiap tahun
- Pembangunan Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Pelebaran Jalan Menambah Lajur
- Rekonstruksi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan

- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
- Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Flyover
- Penggantian Jembatan
- Pelebaran Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Pemeliharaan Berkala Jembatan
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- Pengawasan Teknik Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

Untuk mencapai program/kegiatan diatas diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Rencana terkait dengan jalan mantap akan dilakukan dengan sistem kontrak long segment sehingga jalan-jalan yang rusak bisa ditangani lebih panjang. Kontrak long segment tersebut akan melihat prioritas penanganan seluruh/sepanjang ruas jalan baik efektif maupun fungsional. Long segment merupakan penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus (bisa lebih dari satu ruas) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam yaitu jalan mantap dan standar sepanjang segmen.
- Program/kegiatan prioritas untuk 3 tahun kedepan yaitu penanganan jalan kewenangan provinsi yang rusak ringan dan rusak berat
- Program/kegiatan prioritas untuk 3 tahun kedepan yaitu penanganan jalan kewenangan provinsi yang rusak ringan dan rusak berat, diantaranya;
 - a) Pembangunan jalan Desa Simpang - Ujung Jabung sehingga dapat mendukung peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking dan Candi Muaro Jambi

- b) Pembangunan jalan Suak Kandis - Desa Simpang sehingga dapat mendukung peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking dan Candi Muaro Jambi
- c) Pelebaran jalan diruas jalan Sei. Duren - Sei. Buluh, ruas jalan Tempino - Muara Bulian mendukung peningkatan ekonomi Geopark menuju destinasi wisata dunia (UNESCO)
- d) Pelebaran jalan diruas jalan Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Ma. Sabak mendukung peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking dan Candi Muaro Jambi
- e) Pelebaran jalan diruas jalan Simp. Sawmil - Simp. Logpon mendukung kawasan transmigrasi ex Bathin III Ulu
- f) Rekontruksi jalan Simp. Lagan - Sp. Zona Lima (Sp. Palabi) mendukung akses penunjang pertumbuhan ekonomi Ujung Jabung
- g) Rekontruksi jalan Simp. Talang Pudak - Suak Kandis guna mendukung akses peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking dan Candi Muaro Jambi
- h) Rekontruksi jalan Simp. Pauh - Air Hitam mendukung peningkatan ekonomi Geopark menuju destinasi wisata dunia (UNESCO)
- i) Rekontruksi jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam untuk mendukung peningkatan ekonomi Geopark menuju destinasi wisata dunia (UNESCO)
- j) Rekontruksi jalan di ruas jalan Raden Mattaher - Jln. M. Husni Thamrin, Jl. Abdul Kartawirana, Jl. Rangkayo Hitam - Jl. Rangkayo Pingai - Jl. Sentot Alibasa, Jl. Dr. Sutomo, Jl. DR. Setia Budi - Jln. KH. Hasim Ashari - Jln. Pangeran Diponegoro, Jln. Kol. Polisi M. Taher - Jln. GR. Djamin DT. Bagindo - Jln. Kol. Pol. Ahmad Bestari - Jln. Brigjend.

Katamso, Jln. Hos Cokro Aminoto, Jln. Slamet Riyadi - Jln. Urip Sumoharjo, Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi, Ms - Jln. Yusuf Singedekane- Jln. H. A. Manap - Jl. Arif Rahman Hakim, Jln. RE. Martadinata - Jln. Jend. A. Yani - Jl. Jend MT. Haryono, Jl. Ade Irma Suryani - Jl. Dr. Siwabesi - Jl. KH. Abdul Malik Jambi, Jln. Abdul Rahman Saleh, Jln. Kapt. Pattimura - Jln. Kapten Bakarudin, Jl. R. Siagian - Simp. Alkal - bandara Sultan Thaha Syaifuddin - Lingkar Timur guna mendukung peningkatan ekonomi Kemingking dan Candi Muaro Jambi

- k) Pemeliharaan berkala jalan Ma. Bungo – Peninjauan – Junction, Jln. Peninjauan – Lubuk Mengkuang guna mendukung kawasan transmigrasi ex Bathin III Ulu.
- l) Pemeliharaan rutin jalan di Kab. Tanjung Jabung Barat, Jln. Kab. Tanjung Jabung Timur, Jln. Kab. Muaro jambi, Jln. Kabupateng Batanghari, Jln. Kab. Sarolangun, Jln. Kab. Tebo, Jln. Kab. Bungo, Jln. Kab, Merangin guna mendukung kawasan peningkatan ekonomi Ujung Jabung, Kemingking, Candi, Geopark dan Bathin III Ulu.

C. Bidang Cipta Karya

- 1) Acuan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota.
- Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
- Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi

- Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kab/kota.
 - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas 10 ha – 15 ha.
- 2) Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :
- Pembangunan Islamic Center
 - Pembangunan Jambi Sport Center
 - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi MBR
 - Penyediaan Air Minum Layak
 - Pembentukan Pengembangan dan Pembinaan BPSPAM
 - Pembangunan Sistem Air Minum
 - Pembangunan IPAL
 - Pembangunan TPA Regional
- 3) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
- Program pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
- Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman.
- Program Lingkungan Sehat

- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

D. Bidang Perumahan

1) Acuan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu :

- Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman dikawasan strategis daerah provinsi.
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.
- Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

2) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Pendistribusian dan serah terima rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- Program Peningkatan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

E. Bidang Bina Kontruksi dan Pengendalian

1) Acuan pada upaya yang dilakukan dalam misi ke 6 (enam) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu keterkaitan dalam pemenuhan mutu angkatan kerja konstruksi yang tersertifikasi profesi untuk mendukung daya saing Sumber Daya Manusia.

2) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- Penyiapan Instruktur/ Asessor/ Penyelenggaraan Pelatihan
- Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

- Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
- Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU
- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
- Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

F. UPTD Workshop dan Peralatan

- 1) Acuan pada upaya yang dilakukan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu keterkaitan dalam pengurangan indeks resiko bencana yaitu pemenuhan pengadaan ekskavator atau alat berat lainnya di kecamatan, terutama di daerah rawan bencana longsor dan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Diupayakan penanganan kewenangan jalan provinsi melalui 3 wilayah.
- 2) Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2021-2026. Berikut program/kegiatan yang terkait yang dimaksud, yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Penyelenggaraan Jalan seperti Rehabilitasi jalan

G. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi

1) Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2021-2026 pada persentase peningkatan pendapatan/retribusi bidang infrastruktur ke-PU-an dibanding kondisi tahun awal, Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2) Rencana Kebutuhan Pelatihan tahun 2022 – 2026

- Pelatihan Bidang Ketrampilan Personil Laboratorium
 - Pelatihan Laboratorium Campuran Aspal Panas
 - Pelatihan Laboratorium Beton Ringan (Mortar Ringan)
 - Pelatihan Laboratorium Tanah
 - Pelatihan Laboratorium Beton Tanpa Pemadatan
 - Pelatihan Laboratorium Lapis Pondasi berAgregat
- Pelatihan Peningkatan Pemahaman SNI/ISO 17025 – 2018
 - Pelatihan Pemahaman Sistim Manajemen Laboratorium SNI/ISO 17025 – 2018
 - Pelatihan Audit Internal
 - Pelatihan Kaji Ulang Manajemen
 - Pelatihan K3 Laboratorium
 - Pelatihan Ketidak Pastian Pengukuran

H. Bidang Bina Program dan Tata Ruang

1) Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan Program dan Tata ruang dan evaluasi terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan yang sesuai dengan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033. Pada RTRW Provinsi Jambi tertuang dalam Peraturan

Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi tahun 2013-2033 Provinsi Jambi memiliki 7 kawasan strategis Provinsi yaitu KSP Kota Jambi – Bulian – Sengeti; KSP Perkotaan Muaro Bungo – Muaro Tebo; KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi; KSP Perkotaan Kerinci – Sungai Penuh; KSP Bangko – Sarolangun; KSP Kawasan Candi Muaro Jambi; dan KSP Kawasan Panas Bumi Kerinci – Merangin. Selain itu bidang tata ruang mendorong kegiatan :

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan melalui survei pemetaan
- Program Penyelenggaraan Jalan (Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah)

I. Sekretariat

- 1) Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan Tupoksi sub bagian kesekretariatan yang didukung program/kegiatan penunjang yang lebih bersifat rutin, pemeliharaan, Bintek aparatur, dan pengadaan barang dan jasa.

II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024

Adapun total Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja, Kelompok dan Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana sebagaimana pada lembar lampiran.

.....Tabel.....

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

PENUTUP

Penyusunan Laporan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ini merupakan upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Serta acuan yang berdasarkan pada Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Provinsi.

Melalui rancangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan laporan baik itu laporan pelaksana program kegiatan tahun berjalan maupun acuan akuntabilitas kinerja untuk satu tahun kedepan.

Demikian kami sampaikan rancangan ini, kritik dan saran yang bersifat membangun akan kami terima, dan kami ucapkan terima kasih.

RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			1.461.764.024.000,00		1.216.247.163.683,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.461.764.024.000,00		1.216.247.163.683,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.415.014.024.000,00		1.165.749.163.683,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	54.700.508.000,00	BB Predikat	61.695.023.683,00	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan	8 Dok/Lap	3.149.211.000,00	8 Dok/Lap	3.425.855.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	835.000.000,00	3 Dokumen	890.876.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	165.800.000,00	9 Dokumen	175.390.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	213.200.000,00	9 Dokumen	225.200.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	235.700.000,00	9 Dokumen	255.700.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	200.255.000,00	9 Dokumen	236.809.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	375.800.000,00	2 Laporan	405.900.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.123.456.000,00	2 Laporan	1.235.980.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	39.905.195.000,00	12 Bulan	43.885.772.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/ Bulan	38.357.000.000,00	280 Orang/ Bulan	42.192.700.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.250.345.000,00	1 Dokumen	1.387.250.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	297.850.000,00	1 Dokumen	305.822.000,00	Sekretariat

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	663.423.000,00	1 Tahun	729.765.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	279.510.000,00	2 Dokumen	307.461.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	383.913.000,00	3 Laporan	422.304.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terbinanya aparatur/ pegawai yang berkualitas/berkompetensi	35 Orang	1.120.560.000,00	35 Orang	1.335.700.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.560.000,00	1 Paket	210.500.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	920.000.000,00	30 Orang	1.125.200.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 Laporan	2.668.413.000,00	13 Laporan	2.900.000.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	255.643.000,00	4 Paket	248.208.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68.520.000,00	1 Paket	78.900.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.288.700.000,00	3 Dokumen	1.389.770.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	198.750.000,00	1 Laporan	212.582.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	758.200.000,00	1 Laporan	785.340.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	98.600.000,00	1 Dokumen	185.200.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	35 Unit	610.890.000,00	35 Unit	2.176.150.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	Sekretariat
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0 Unit	1.500.000.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	20.000.000,00	18 Paket	25.000.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	165.890.000,00	35 Unit	185.850.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	425.000.000,00	8 Unit	465.300.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	4.170.767.000,00	1 Tahun	4.466.447.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.688.000,00	1 Laporan	28.790.000,00	Sekretariat

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.195.557.000,00	1 Laporan	1.225.557.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	198.722.000,00	1 Laporan	224.880.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.750.800.000,00	2 Laporan	2.987.220.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	364 Unit	2.412.049.000,00	370 Unit	2.775.334.683,00	Sekretariat
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	90 Unit	1.373.103.000,00	95 Unit	1.510.414.000,00	Sekretariat
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	253.746.000,00	95 Unit	279.120.683,00	
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	5 Unit	785.200.000,00	5 Unit	985.800.000,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tercapainya Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu pada tahun berkenaan Persentase luas baku daerah irigasi yg terairi	90,16 Persen 90,16 Persen	184.404.326.000,00	90,16 Persen 90,16 Persen	187.298.026.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan wilayah Sungai kewenangan provinsi yang ditangani	2 Lokasi	88.304.326.000,00	2 Lokasi	126.998.026.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0005	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	0,00	1 Bendungan	0,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	0 Unit	0,00	0 Unit	2.500.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber	5 Lembaga	4.166.980.000,00	5 Lembaga	4.166.980.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0077	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,1 KM	300.000.000,00	0,1 KM	350.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5 KM	15.000.000.000,00	7 KM	17.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan	0,03 KM	250.000.000,00	0,03 KM	500.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0086	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,5 KM	1.456.300.000,00	0,5 KM	3.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	Jumlah Dokumen Evaluasi dan	5 Dokumen	1.000.000.000,00	5 Dokumen	1.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	0 Unit	0,00	0 Unit	10.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber	5 Lembaga	1.000.000.000,00	5 Lembaga	1.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	400.000.000,00	4Unit	400.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,1 KM	11.000.000.000,00	0,1 KM	11.500.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0,00	0 KM	250.000.000,00	Sumber Daya Air

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	02	1.01	0098	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0 KM	0,00	0 KM	5.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	0 KM	0,00	0 KM	500.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1.000.000.000,00	5 Dokumen	1.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	1.281.046.000,00	5 Unit	1.281.046.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1,5 KM	250.000.000,00	2 KM	300.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,10 KM	300.000.000,00	0,10 KM	350.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	0 Unit	0,00	0 Unit	6.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	10 Titik	7.000.000.000,00	15 Titik	7.500.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	5 Dokumen	3.500.000.000,00	6 Dokumen	3.500.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,25 KM	30.000.000.000,00	0,25 KM	35.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.500.000.000,00	1 Unit	6.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokumen	5.000.000.000,00	7 Dokumen	5.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	3.500.000.000,00	8 Dokumen	3.500.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	82.18 %	96.100.000.000,00	82.18 %	60.300.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2 KM	20.000.000.000,00	2,5 KM	20.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	30.000.000.000,00	1 Bendung	0,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	0,00	0 KM	0,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	10.000.000.000,00	2,5 KM	10.000.000.000,00	Sumber Daya Air

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	02	1.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0,2 KM	1.000.000.000,00	0,2 KM	0,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	10.000.000.000,00	2,5 KM	12.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	5.000.000.000,00	1 Bendung	0,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	4 KM	3.600.000.000,00	6 KM	3.000.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	4.500.000.000,00	7 KM	4.650.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 KM	5.000.000.000,00	9 KM	5.250.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	5.000.000.000,00	10 Dokumen	3.500.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	1 DI	500.000.000,00	1 DI	50.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0038	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	0 Kawasan	0,00	0 Kawasan	300.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0039	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	1 DI	1.500.000.000,00	1 DI	1.550.000.000,00	Sumber Daya Air
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85 Persen	105.000.000.000,00	85 Persen	31.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Proporsi tumah tangga dengan akses berkelanjutan tahapan air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85 %	105.000.000.000,00	85 %	31.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	2 Kabupaten/Kota	0,00	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	150 Orang	2.000.000.000,00	200 Orang	0,00	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	150 Liter/Detik	101.000.000.000,00	150 Liter/Detik	30.000.000.000,00	Cipta Karya

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0 Kabupaten/Kota	0,00	0 Kabupaten/Kota	0,00	Cipta Karya
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan regional yang terbangun	1 Unit	10.750.000.000,00	1 Unit	900.000.000,00	Cipta Karya
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yang terbangun	3 Dok/Lap	10.750.000.000,00	3 Dok/Lap	900.000.000,00	Cipta Karya
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	2 Kabupaten/Kota	800.000.000,00	2 Kabupaten/Kota	400.000.000,00	Cipta Karya
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	1 Ton/hari	1.650.000.000,00	1 Ton/hari	0,00	Cipta Karya
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	100 Orang	1.500.000.000,00	200 Orang	500.000.000,00	Cipta Karya
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	7 Dokumen	6.800.000.000,00	10 Dokumen	0,00	Cipta Karya
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak , Persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman	60 Persen 85,27 Persen 34,54 Persen	43.404.300.000,00	60 Persen 85,27 Persen 34,54 Persen	21.904.000.000,00	Cipta Karya
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman	34,54 Persen	43.404.300.000,00	34,54 Persen	21.904.000.000,00	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	20 M³/Hari	31.504.300.000,00	20 M³/Hari	10.004.000.000,00	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200 Orang	400.000.000,00	220 Orang	400.000.000,00	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	12 Dokumen	10.000.000.000,00	14 Dokumen	10.000.000.000,00	Cipta Karya

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/kota	1.000.000.000,00	2 kabupaten/kota	1.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	2 Unit	500.000.000,00	2 Unit	500.000.000,00	Cipta Karya
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani	35 Persen	60.500.000.000,00	35 Persen	60.300.000.000,00	Cipta Karya
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya saluran drainase sebagai pengendali banjir	5 Unit	60.500.000.000,00	5 Unit	60.300.000.000,00	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	20 Sistem Drainase Perkotaan	17.000.000.000,00	25 Sistem Drainase Perkotaan	17.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	1.800.000.000,00	15 Sistem Drainase Perkotaan	1.800.000.000,00	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	10 Unit	30.000.000.000,00	15 Unit	30.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	10 Dokumen	10.000.000.000,00	13 Dokumen	10.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	10 Dokumen	1.700.000.000,00	12 Dokumen	1.500.000.000,00	Cipta Karya
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	52.000.000.000,00	-	32.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-	52.000.000.000,00	-	32.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	07	1.01	0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi						Cipta Karya
						Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	100 Ton/hari	50.000.000.000,00	100 Ton/hari	30.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	07	1.01	0033	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah	1000 M³/Hari	2.000.000.000,00	1000 M³/Hari	2.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	37,50 Persen 4 Persen	25.059.250.000,00	37,50 Persen 4 Persen	24.059.250.000,00	Cipta Karya
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi	8 Unit	25.059.250.000,00	8 Unit	24.059.250.000,00	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan	Jumlah Peserta yang Mengikuti	200 Orang	1.000.000.000,00	200 Orang	1.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	150 Rumah Negara	500.000.000,00	150 Rumah Negara	500.000.000,00	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya	2 Bangunan	2.100.000.000,00	2 Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	10 Bangunan Gedung Negara	300.000.000,00	15 Bangunan Gedung Negara	300.000.000,00	Cipta Karya

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	20 Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	25 Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	25 Lisensi	1.000.000.000,00	50 Lisensi	1.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk	Jumlah Dokumen Pembangunan,	10 Dokumen	159.250.000,00	15 Dokumen	159.250.000,00	Cipta Karya
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	30 %	82.400.000.000,00	30 %	22.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	2 Kawasan	82.400.000.000,00	2 Kawasan	22.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	5 Kawasan	80.400.000.000,00	11 Kawasan	20.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan	1 Dokumen	1.000.000.000,00	3 Dokumen	1.000.000.000,00	Cipta Karya
1	03	09	1.01	0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000,00	3 Dokumen	500.000.000,00	Cipta Karya
1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 kabupaten/kota	500.000.000,00	1 kabupaten/kota	500.000.000,00	Cipta Karya
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	85,325 Persen	780.795.640.000,00	85,325 Persen	709.892.864.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	85,325 %	780.795.640.000,00	85,325 %	709.892.864.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	1,032,844 KM	17.000.000.000,00	1,032,844 KM	18.000.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	95 Jembatan	2.400.000.000,00		0,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	2.850.000.000,00	30 Jembatan	3.200.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	285 Jembatan	2.450.000.000,00	287 Jembatan	2.550.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2 KM	500.000.000,00	4 KM	550.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	21 KM	176.720.000.000,00	25 KM	200.000.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	6 Jembatan	125.000.000.000,00	8 Jembatan	132.000.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	200 KM	55.000.000.000,00	300 KM	68.000.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	6.000.000.000,00	2 KM	13.800.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	10 Jembatan	10.200.000.000,00	14 Jembatan	0,00	Bina Marga

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	9 KM	49.400.000,00	13 KM	104.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0039	Pembangunan Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	1 Flyover	120.000.000.000,00		0,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	10 KM	115.200.000.000,00	13 KM	102.400.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,	11 Dokumen	18.400.000.000,00	13 Dokumen	19.000.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	13 KM	124.600.000.000,00	15 KM	147.200.000.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	1.626.240.000,00	2 KM	1.788.864.000,00	Bina Marga
1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen	2.800.000.000,00	3 Dokumen	1.300.000.000,00	Bina Marga
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	54 Persen	13.150.000.000,00	54 Persen	11.850.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang di sertifikasi	120 Orang	6.500.000.000,00	120 Orang	6.850.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Orang	150.000.000,00	1 Orang	170.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	75 Dokumen	1.600.000.000,00	75 Dokumen	1.730.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	120 Orang	2.150.000.000,00	120 Orang	2.230.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Lembaga	1.250.000.000,00	75 Lembaga	1.270.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	40 Orang	700.000.000,00	40 Orang	750.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Orang	150.000.000,00	1 Orang	150.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	3 Lembaga	500.000.000,00	3 Lembaga	550.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	3 Dokumen	3.400.000.000,00	3 Dokumen	2.400.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	650.000.000,00	1 Layanan Informasi	650.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	250.000.000,00	1 Perangkat Pendukung	250.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang	1.000.000.000,00	250 Orang	1.000.000.000,00	Bina Konstruksi

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	2 Dokumen	3.250.000.000,00	2 Dokumen	2.600.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	5 Paket Pekerjaan	1.000.000.000,00	5 Paket Pekerjaan	1.000.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan	5 Bangunan Konstruksi	250.000.000,00	5 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	2.000.000.000,00	3 Dokumen	1.500.000.000,00	Bina Konstruksi
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	10 Persen	2.850.000.000,00	10 Persen	2.850.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Revisi RTRW Provinsi Jambi	5 Dok/Lap	750.000.000,00	5 Dok/Lap	750.000.000,00	Bina Program dan
1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.01	0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	250 Orang	500.000.000,00	250 Orang	500.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	4 Dok/Lap	600.000.000,00	4 Dok/Lap	600.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	4 Dok/Lap	450.000.000,00	4 Dok/Lap	450.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	4 Dok/Lap	1.050.000.000,00	4 Dok/Lap	1.050.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik	1 Kasus	300.000.000,00	1 Kasus	300.000.000,00	Bina Program dan
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	Bina Program dan Tataruang

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	250.000.000,00	1 Kasus	250.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	250.000.000,00	1 Berita Acara	250.000.000,00	Bina Program dan Tataruang
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			46.750.000.000,00		50.498.000.000,00	Perumahan
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	100 Persen 100 Persen	4.500.000.000,00	100 Persen 100 Persen	3.800.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5 Dok/Lap	475.000.000,00	5 Dok/Lap	650.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	100.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	275.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi						Perumahan
						Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Terselenggaranya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 Persen	540.000.000,00	100 Persen	540.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang	50 Orang	90.000.000,00	50 Orang	90.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	50 Orang	90.000.000,00	50 Orang	90.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	90.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 orang	90.000.000,00	1 orang	90.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	50 Orang	90.000.000,00	50 Orang	90.000.000,00	Perumahan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50 Orang	90.000.000,00	50 Orang	90.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 Persen	3.485.000.000,00	100 Persen	2.610.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	49 Unit Rumah	980.000.000,00	49 Unit Rumah	1.000.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	28 Unit Rumah	980.000.000,00	28 Unit Rumah	1.120.000.000,00	Perumahan
1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	5 Unit Rumah	1.000.000.000,00	5 Unit Rumah	0,00	Perumahan
1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	15 Unit Rumah	525.000.000,00	15 Unit Rumah	490.000.000,00	Perumahan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh	100 Persen	28.550.000.000,00	100 Persen	28.325.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Tertata Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100 Persen	15.850.000.000,00	100 Persen	15.625.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	Perumahan
1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	2 Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	2 Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.01	0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program	Jumlah Rumah Tangga Terdampak	20 Rumah	15.075.000.000,00	20 Rumah Tangga	15.000.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Orang	75.000.000,00	1 Orang	75.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.01	0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi	1 Rumah	200.000.000,00	1 Rumah Tangga	200.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	60,71 Persen	12.700.000.000,00	60,71 Persen	12.700.000.000,00	Perumahan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	550 Unit Rumah	11.000.000.000,00	550 Unit Rumah	11.000.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.02	0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	40 Dokumen	400.000.000,00	40 Dokumen	400.000.000,00	Perumahan
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	10 Hektar	1.200.000.000,00	10 Hektar	1.200.000.000,00	Perumahan
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat	18 Persen	13.700.000.000,00	18 Persen	18.373.000.000,00	Perumahan
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang di Selenggarakan	52 Unit	13.700.000.000,00	52 Unit	18.373.000.000,00	Perumahan
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5 Dokumen	1.000.000.000,00	10 Dokumen	1.346.000.000,00	Perumahan
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi	52 Lokasi	12.500.000.000,00	70 Lokasi	16.827.000.000,00	Perumahan
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	Perumahan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
					UPTD workshop dan Peralatan			40.348.347.111,00		43.574.978.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.348.347.111,00		43.574.978.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			40.348.347.111,00		43.574.978.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah		14.975.093.111,00		16.364.399.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1.904.291.111,00	12 Bulan	2.136.421.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.904.291.111,00	1 Dokumen	2.136.421.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	3.868.387.000,00	3 Laporan	4.255.223.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.024.000,00	1 Paket	51.726.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.443.595.000,00	1 Paket	3.787.954.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.449.000,00	1 Paket	58.793.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	324.319.000,00	150 Laporan	356.750.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	35 Unit	4.619.000.000,00	35 Unit	4.931.000.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	3.119.000.000,00	2 Unit	3.431.000.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.500.000.000,00	3 Unit	1.500.000.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	995.033.000,00	1 Tahun	1.094.535.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.470.000,00	1 Laporan	9.317.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	140.633.000,00	1 Laporan	154.695.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Laporan	845.930.000,00	29 Laporan	930.523.000,00	UPTD workshop dan Peralatan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	4	7	8
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	54 unit	3.588.382.000,00	54 unit	3.947.220.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	3.208.631.000,00	54 Unit	3.529.494.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	54 Unit	379.751.000,00	54 Unit	417.726.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	85,325 Persen	25.373.254.000,00	85,325 Persen	27.210.579.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	85,325 %	25.373.254.000,00	85,325 %	27.210.579.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	400 KM	25.373.254.000,00	400 KM	27.210.579.000,00	UPTD workshop dan Peralatan
					UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			4.850.000.000,00		5.255.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.850.000.000,00		5.255.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4.850.000.000,00		5.255.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah		4.850.000.000,00		5.255.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terbinanya aparatur/ pegawai yang berkualitas/berkompetensi	50 Orang	550.000.000,00	50 Orang	550.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	550.000.000,00	50 Orang	550.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 Laporan	300.000.000,00	13 Laporan	305.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	90.000.000,00	45 Paket	90.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	125.000.000,00	1 Paket	125.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	85.000.000,00	12 Laporan	90.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	7 Unit	1.500.000.000,00	7 Unit	1.800.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1.500.000.000,00	7 Unit	1.800.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	7 Unit	2.500.000.000,00	7 Unit	2.600.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.500.000.000,00	7 Unit	2.600.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
J U M L A H								1.506.962.371.111,00		1.265.077.141.683,00	